

Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Sam Sachrul Mamonto^{a,1}, Stefanus Sampe^{a,2}, Maxi Egeten^{a,3}

¹ samsmamonto@gmail.com, ²stefanusampe@unsrat.ac.id, ³maxiegeten@unsrat.ac.id

^aProgram Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115 Indonesia

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengembangan desa wisata yang sudah dilakukan selama ini dari tahap agenda, formulasi, adopsi dan legitimasi, implementasi sampai dengan evaluasi. Metodologi penelitian yang didesain dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di 6 (enam) Desa yang kemudian lebih dikonsentrasikan pada 2 (dua) Desa yaitu Desa Atoga Timur dan Desa Bukaka. Pengambilan atau pengumpulan data difokuskan pada kebijakan pemerintah. Penentuan dan jumlah informan 24 orang. Instrument penelitian antara lain menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan desa wisata pada tahap agenda sudah dilakukan dengan baik, pada tahap formulasi kebijakan melibatkan semua stakeholder namun secara pribadi mereka tidak paham apa keterkaitannya dengan desa wisata. Selanjutnya untuk Tahap adopsi dan legitimasi untuk Peraturan Bupati tentang Desa Wisata mereka mengetahui namun tidak tahu isinya dan saat ini sedang diproses perubahan Peraturan Bupati dan Peraturan Desa yang lebih konsisten untuk Desa Wisata. Tahap Implementasi dilapangan kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder yang mengindikasikan kurangnya pemahaman program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan terkait pengembangan Desa Wisata. Akhirnya untuk evaluasi kebijakan pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongodow Timur bahwa perkembangan pariwisata lambat baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Kesimpulannya, Kebijakan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang baik bukan pada tahapan agenda sampai dengan evaluasinya tetapi pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu melalui analisis kebijakan dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang ada terkait kemampuannya dalam menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang bersinar.

Kata kunci: Kebijakan, Desa Wisata, Boltim

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan salah satu dari 11 kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang berkembang terus menerus ke arah perubahan dan perbaikan terus menerus, baik itu dari sisi infrastruktur di berbagai sektor sampai dengan sumber daya manusianya. Uniknya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga memiliki potensi sumber daya alam yang *comparative advantage* untuk mendukung potensi pariwisata yaitu kekayaan Abiotik, Biotik dan *Culture*. Menariknya pariwisata saat ini menjadi *leading sector* menghadapi Pandemi Covid 19 karena bagi pemerintah sektor pariwisata dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dan bagi masyarakat adanya sebuah objek wisata akan mampu memberikan hiburan ditengah-tengah rutinitas sehari-hari, jika kedua hal ini dikolaborasikan artinya pariwisata dapat memberikan solusi yang baik dan memiliki *multiplier effect* bagi pertumbuhan perekonomian di desa saat Pandemi Covid 19.

Desa merupakan aset utama dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat desa untuk membangun wilayahnya. Pembangunan dan pengembangan desa merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari perwujudan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, membuka kesempatan kerja lapangan berusaha meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, melalui Desa Wisata.

Desa Wisata dalam konteks wisata pedesaan adalah aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut Sudibya (2018).

Pariwisata oleh Zendrato (2014) didefinisikan sebagai berikut:

“Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan sebagainya, yang merupakan objek kajian sosiologi. Pariwisata bukanlah suatu kegiatan yang beroperasi dalam ruang hampa. Pariwisata sangat terkait masalah sosial, politik, ekonomi, keagamaan, ketertiban, keramahtamahan, kebudayaan, kesehatan, dan seterusnya, termasuk institusi sosial yang mengaturnya”.

Hal ini mengindikasikan bahwa pariwisata melibatkan *multidipliner* ilmu diberbagai aspek, dari sisi ilmu politik pariwisata termasuk sebagai “the

mother of science". Mengapa demikian, karena aspek politik dalam sektor pariwisata memiliki peranan yang cukup krusial mengingat sebuah kebijakan pariwisata yang dirumuskan oleh pemerintah mengandung berbagai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat politis akan melibatkan berbagai kepentingan didalamnya.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang akan mendatangkan banyak sekali keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah karena sektor pariwisata menciptakan dampak-dampak ekonomi pada kesejahteraan masyarakat. Wisatawan yang sedang berwisata, pasti akan mengeluarkan biaya baik untuk memenuhi akomodasinya selama melakukan perjalanan wisata, seperti biaya untuk tempat penginapan, biaya transportasi, membeli cinderamata, dan keperluan-keperluan lain.

Fenomenanya, data PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merepresentasikan potensi PDRB Pariwisata yang memperlihatkan isu terkait pariwisata saat ini yaitu kesadaran dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya data persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata dapat dilihat pada Tabel A, sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata	0,28	0,32	0,35	0,397	0,340

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020

Tabel 1 memperlihatkan data dari Dinas Pariwisata Tahun 2020 pada Tahun 2016 sebesar 0,28% dan terus mengalami peningkatan menjadi sampai dengan Tahun 2019 sebesar 0,397%. Perlambatan terjadi pada Tahun 2020, karena adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Tahun 2020, jumlah kunjungan wisata adalah 31.915 kunjungan, yang terdiri dari kunjungan nusantara dan domestik. Kunjungan wisata ke objek wisata yang paling banyak dikunjungi yaitu Goba Molunow, Tanjung Silar, Café Strawberry, Gunung Ambang, Danau Mooat, Villa Mooat, Tanjung Woka, Pulau Nenas dan Air Terjun Matabulu. Selanjutnya, Tabel B memperlihatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Tabel 2. Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kunjungan Wisata	94.19	168.30	256.59	320.83	31.91

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020

Berdasarkan data pada Tabel B terlihat penurunan sebesar 288.921 kunjungan pada Tahun 2020, hal ini terjadi karena adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19, sehingga objek-objek wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditutup untuk mencegah penyebaran. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki berbagai kekayaan alam, kearifan lokal, dan keberagaman budayanya sebagai pondasi kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan yang diperkuat dengan dasar hukum yaitu Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Nomor 143 Tahun 2018 untuk penetapan 6 (enam) Desa Wisata dari 81 desa, yang merupakan pengewajawantahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Objek Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maka jumlah potensi Objek Wisata yang ada di daerah ini sebanyak 61 Lokasi. Namun demikian, seiring dengan terus diadakannya survei serta identifikasi potensi objek wisata maka hasil survey sampai dengan Tahun 2020 jumlah potensi objek wisata yang ada di daerah ini bertambah menjadi 85 lokasi di mana klasifikasinya terdiri dari: Wisata Alam 65 Lokasi, Wisata Buatan 15 Lokasi dan Wisata Budaya 5 Lokasi, dengan jumlah kunjungan wisata baik mancanegara maupun domestik Tahun 2020 adalah 31.915 wisatawan. Dari 85 (delapan puluh lima) lokasi potensi objek wisata yang ada di daerah ini belum semua dikembangkan sebagai Desa Wisata. Objek wisata yang sudah dikembangkan dan dikelola baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak swasta hanya berjumlah 12 lokasi. Hal ini karena masih terbatasnya anggaran yang ada, terutama pada pemerintah daerah. Adapun lokasi-lokasi objek wisata yang telah dikembangkan dan sedang dikembangkan oleh pemerintah Daerah sebanyak 5 Lokasi dan Pihak Swasta 7 Lokasi dengan rincian sebagai berikut: Objek Wisata yang dikelola oleh swasta (Objek Wisata Outbon Tobongon, Objek Wisata D'Mooat, Objek Wisata Villa Mooat, Objek Wisata Goba Molunow, Objek Wisata

River View, Objek Wisata Pantai Chimoky, Objek Wisata Pantai Cinta) dan Objek Wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah (Objek Wisata Danau Moot, Objek Wisata Tanjung Silar, Objek Wisata Pantai Abadi, Objek Wisata Pantai Woka, Objek Wisata Diving Center).

Permasalahan yang terjadi antara potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia adalah masyarakat tidak mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada untuk memanfaatkan sebagai potensi wisata di kawasan ini, hal ini dapat dilihat dari masih ada data dari Dinas Pariwisata yang menyatakan tidak maksimalnya pemanfaatan potensi alam juga masyarakat belum sepenuhnya bergantung pada aktivitas pariwisata dan pemahaman masyarakat terhadap potensi desanya, sehingga pada saat pengajuan usulan dukungan kebijakan pemerintah untuk mempromosikan potensi wisata yang di desa mereka belum maksimal, misalkan pengadaan fasilitas dan prasarana masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya Desa Wisata. Hal ini memerlukan kebijakan politik yang kuat.

Reseach gap pada penelitian ini yaitu beberapa penelitian terdahulu antara lain, dilakukan oleh Rohmah (2020), yang menemukan tentang bagaimana adaptasi kebijakan ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi pariwisata. Selanjutnya, penting untuk mengevaluasi kembali setiap tahapan kebijakan walaupun bukan berarti langsung mengganti dengan kebijakan yang baru. Karena, kajian ulang perencanaan pembangunan ekonomi tidak berarti merubah total perencanaan, tetapi menambahkan sebagian sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dengan lebih fleksibel (Pambudi, 2020). Mapahena (2020) tentang implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Selat Lembe Kecamatan Lembe Selatan Kota Bitung di mana terdapat temuan bahwa pengembangan objek wisata belum terlaksana dengan baik karena sulitnya menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar dalam hal kerjasama pemeliharaan dan penunjang fasilitas pembangunan serta pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan) lebih cenderung menggunakan pendekatan *top-down*. Akibatnya ruang oleh Christian (2019) menyimpulkan bahwa efektifitas implementasi kebijakan pengembangan pariwisata (studi di Kabupaten Manggarai partisipasi bagi masyarakat sangat terbatas. Serta dipengaruhi oleh kinerja implementator kebijakan belum optimal, terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia, egosektoral yang masih sangat kuat, sehingga koordinasi dan komunikasi tidak berjalan efektif dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik yang membungkus sirkulasi

kehidupan masyarakat cenderung menghalangi terjadinya Implementasi Kebijakan efektif.

Hal serupa juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan dan Hutagalung (2019) pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan di selama ini menghadapi masalah pokok yaitu: keterbatasan SDM kepariwisataan, baik secara kuantitas maupun kualitas (kompeten dan profesional), belum baiknya infrastruktur (sarana dan prasarana), khususnya akses jalan dan jaringan transportasi, menuju destinasi wisata sehingga berpengaruh terhadap kinerja sektor kepariwisataan; koordinasi lintas-instansi dan lintas-pelaku yang belum optimal. Padahal pentingnya membangun infrastruktur pengembangan pariwisata semestinya melalui perencanaan dan teknik yang tepat guna menjamin keberhasilan dalam pembangunannya (Sugiarto dan Mahagangga, 2020)

Alasan penelitian ini penting dilakukan, karena pertama, pengembangan Pariwisata merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 11 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. kedua, pentingnya kebijakan pemerintah yang diintervensi untuk pengembangan Desa Wisata di saat pandemic Covid 19. ketiga, keunikan objek penelitian yaitu pada Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena memiliki potensi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya. Keempat, karena *Visi Kabupaten Bolaang Mongodow Timur* yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang Aman, Berbudaya dan Sejahtera melalui Sinergitas Pembangunan Perdesaan". Didukung juga dengan *Misi kedua* yaitu "Meningkatkan Budaya dan Pariwisata yang Berkearifan Lokal", maka penting diteliti kebijakan untuk menjadi referensi kedepan ketika pemerintah akan membuat kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi.

Studi ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya karena studi ini menguji pengembangan Desa Wisata lebih pada sisi kebijakan dengan membahas setiap Tahapan Kebijakan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang jelas tampak perbedaannya dari perumusan masalah, metodologi sampai dengan hasil penelitian (yang dijelaskan pada Bab II yaitu pada tabel mapping penelitian terdahulu). Selanjutnya pertanyaan penelitian yang penting untuk dijawab dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Kebijakan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur".

Penelitian ini bertujuan untuk "Menganalisis kebijakan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang difokuskan pada peranan pemerintah dalam merumuskan kebijakan (yang sudah dilakukan, sementara dilakukan dan yang akan dilakukan). Informan diambil menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari sangadi desa wisata dan pengelola obyek wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selanjutnya dilakukan teknik *snowball* diakibatkan dilakukannya pengembangan informasi sesuai petunjuk yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, *focus group discussion* dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari beberapa tahap yakni kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan masalah dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah dengan cara melihat dokumen perencanaannya, terutama Renstra dan RPJMD. Pengetahuan terhadap indicator capaian dari Dinas Pariwisata Tahun 2020 Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu:

1. Jumlah Kunjungan wisata dengan target sebesar 48.772 wisatawan dan terealisasi sebesar 31.915 wisatawan
2. Persentasi peningkatan PDRB dari sektor pariwisata dengan target sebesar 0.38% dan terealisasi sebesar 0.34%

Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, memiliki permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2021-2026 untuk itu Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan pemetaan masalah terkait pelayanan. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mencantumkan beberapa indicator yang sejalan dengan Renstra Kementerian Pariwisata sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di daerah tujuan wisata
2. Meningkatkan lama tinggal wisatawan
3. Meningkatkan PAD sektor pariwisata

Terhadap pencapaian indikator tersebut, dinas pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menyesuaikan dengan indicator tersebut, namun demikian menemui beberapa hambatan untuk mencapainya diantaranya:

1. Kemampuan SDM bidang pariwisata yang belum merata kualitasnya

2. Belum meratanya kualitas obyek dan daya tarik wisata
3. Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pengembangan bidang pariwisata belum memadai

Oleh sebab itu tujuan Dinas Pariwisata adalah meningkatnya kepariwisataan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan Sasaran yaitu meningkatkan lama kunjungan dan PAD sektor pariwisata, selanjutnya Strategi Dinas Pariwisata dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi wisata yang dikelola secara maksimal
2. Meningkatkan Pendidikan dan pelatihan (diklat) terhadap para pelaku usaha yang bergerak di industri pariwisata
3. Meningkatkan penataan aksesibilitas destinasi pariwisata
4. Menggali potensi adat dan budaya lokal secara maksimal
5. Memperbanyak kegiatan sosialisasi tentang manfaat sektor kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung sektor kepariwisataan
7. Mengadakan sosialisasi ekonowisata berbasis masyarakat
8. Mengadakan sosialisasi kepada para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat tentang manfaat penyeteroran PAD
9. Perlu adanya revisi perda tentang usaha pariwisata

Selanjutnya arah kebijakan dalam Renstra dinas pariwisata meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata dengan pengembangan ekonomi kreatif dan pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif. Sejalan dengan penelitian Hermawan (2016) yang menemukan bahwa pengembangan Desa Wisata membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa, diantaranya penghasilan masyarakat meningkat serta meningkatkan peluang kerja dan berusaha, meningkatkan kepemilikan dan control masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata, sedangkan indikasi dampak negatif terhadap ekonomi lokal berupa kenaikan harga barang tidak ditemukan. Demikian juga keterangan dari sangadi bahwa belum terasa dampak negatif dari penetapan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pelaksanaan pengembangan pariwisata harus terencana secara terpadu dengan pertimbangan-pertimbangan terutama terhadap aspek ekonomi dan sosial-budaya masyarakat lokal. Pada setiap tahapan pengembangan tersebut, pelaku pariwisata hendaknya dapat meminimalisasi sebanyak

mungkin dampak negatif yang akan timbul serta berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian dan sosial-budaya masyarakat setempat untuk strategi pengembangan dibuatlah pengembangan Desa Wisata Mandiri Pariwisata yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat Desa Wisata.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata menjadi suatu hal penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program. Implementasi menjadi kunci untuk menakar sejauh mana Kebijakan Publik berdampak penting ke publik atau tidak. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh banyak faktor baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, model implementasi kebijakan sangat memengaruhi bagaimana sebuah kebijakan bisa di tetapkan atau dikaji berdasarkan kompleksitas yang ada.

Implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah dilakukan dengan menetapkan 2 (dua) desa sebagai model penerapan Desa Wisata disamping desa-desa lainnya akan dikembangkan selanjutnya. Wawancara dengan informan memberi informasi bahwa pengembangan Desa Wisata sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan penetapan kebijakan Desa Wisata tentu akan membawa perubahan yang signifikan terhadap wajah desa.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan Desa Wisata belum berjalan sebagaimana apa yang diharapkan. Masih terdapat banyak kendala-kendala yang dijumpai dalam proses pelaksanaan kebijakan Desa Wisata. Padahal dengan adanya program/kebijakan Desa Wisata ini mampu merubah tampilan desa yang dahulunya desa agraris kini menjelma menjadi Desa Wisata dengan akulturasi modern yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kendala-kendala yang ditemui dalam proses pelaksanaan kebijakan Desa Wisata adalah sarana infrastruktur yakni jalan juga akomodasi yang belum tersedia sesuai standard yang ada sehingga menghambat aksestabilitas wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata yang tersebut di Desa Wisata. Disamping itu faktor lainnya seperti sumberdaya manusia, faktor komunikasi, struktur birokrasi, wewenang dan disposisi (kecenderungan).

Faktor sumberdaya manusia menurut Edward III (1980) menjadi faktor yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan program Desa Wisata. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang ilmunya maka dalam merencanakan dan melaksanakan suatu program

akan berjalan dengan baik karena di dukung sesuatu yang profesional.

Wawancara dengan informan sangadi di desa menjelaskan bahwa sumber daya manusia belum tersedia sebagaimana kebutuhan untuk Desa Wisata. Menurut informan bahwa perlu adanya dukungan pemerintah daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal dalam mendukung kebijakan pengembangan Desa Wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi kendala dalam mendukung pengembangan Desa Wisata. Kurang sekali pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, penguasaan bahasa asing dari masyarakat desa tujuan wisata. Disamping itu, terbatasnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi pekerjaan menyebabkan banyak prosedur penerapan kebijakan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Ketersediaan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya dinas Pariwisata di pandnag belum maksimal sehingga menjadi hambatan dalam pengimplementasian kebijakan program Desa Wisata. Kemampuan pegawai belum semuanya memenuhi bidang tugas yang dibutuhkan.

Faktor lainnya adalah komunikasi dimana menurut Edward III (1980) komunikasi menjadi aspek yang penting didalam keberhasilan imlementasi progam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi menjadi salah satu kendala yang menghambat berjalannya program Desa Wisata. Hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa belum sepenuhnya dibahas. Program Desa Wisata karena program kelompok terbentuk dengan masing-masing memiliki kesibukan.

Buruknya komunikasi dan kesibukan para pengurus menyebabkan banyak program kerja untuk Desa Wisata belum disusun. Faktor penyebab pengurus kurang serius dalam mengurus program Desa Wisata adalah para pengurus bekerja hanya sebatas pengabdian atau sukarela tidak mendapatkan insentif atas honor. Beberapa hal dalam komunikasi antara lain transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi berkaitan penyampaian pesan dalam hal implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata, proses transmisi setidaknya dibedakan dua bagian, yaitu: transmisi antara pemimpin birokrasi, organisasi pelaksana, dan transmisi antara birokrasi dan pemangku kepentingan serta sasaran kebijakan secara umum yaitu masyarakat.

Faktor transmisi telah berjalan dimana Bupati sebagai pemimpin menentukan arah kebijakan telah

memaparkan maksud dan tujuan kebijakan kepada dinas terkait dengan leading sector-nya adalah Dinas Pariwisata. Hal yang kedua adalah transmisi dengan dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi buruk yang dimiliki secara langsung oleh pemerintah maupun yang melibatkan pihak masyarakat.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan Pengembangan Desa Wisata masih banyak mengalami hambatan terutama pada faktor kejelasan. Dari sudut pandang ini, menurut Edward III faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi adalah kompleksitas kebijakan dan tidak tercapainya komunikasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Ketidakjelasan informasi lainnya tampak pada bagaimana proses membangun partisipasi penduduk dilaksanakan. Dari aspek konsistensi, komunikasi kebijakan pengembangan Desa Wisata telah dilaksanakan secara konsisten.

Masalah yang ada masih ditemukan adanya implementasi yang setengah hati karena implementor yang relatif longgar dalam melaksanakan perintah implementasi kebijakan. Dalam hal ini menurut Edward, faktor terpenting yang bisa menjadi penjelasan mengapa komunikasi kebijakan yang baik tak bisa menyajikan implementasi yang baik adalah dari dukungan organisasi pelatihan. Jika organisasi pelaksana setuju dengan tujuan kebijakan maka komunikasi kebijakan akan lebih lancar dan implementasi kebijakan akan lebih berkualitas. Implementasi kebijakan yang efektif menempatkan faktor kecenderungan atau disposisi sebagaimana salah satu aspek yang mempunyai konsekuensi penting. Para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan sehingga implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata dalam penelitian ini maka persepsi pelaksana terhadap kebijakan tersebut adalah mendukung sepenuhnya. Argumentasinya adalah seluas untuk kepentingan daerah, para pelaksana mendukung karena implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan juga sebagai seorang birokrat. Para pelaksana di timur yang menjadi leading sector kebijakan pemerintah cukup aktif mengkoordinasikan semua hal teknis terkait implementasi kebijakan yang melibatkan badan/organisasi pelaksana lainnya.

Peran tim pelaksana sangatlah penting bagi keberhasilan program Desa Wisata. Sama

sepertinya adalah pelestarian adat seni budaya karena perkembangan mobilitas menyebabkan generasi sekarang kurang berminat melibatkan diri dalam melestarikan potensi wisata yang ada. Hasil penelitian ini ditentukan bahwa masyarakat memang dilibatkan meskipun bukan semuanya mengambil bagian. Partisipasi publik dalam hal pengembangan Desa Wisata harus bersifat substantif dan nyata. Masyarakat lokal bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga berkreasi menjadi pelaksana, pelaku usaha jasa pariwisata dan mempunyai kesadaran penuh sebagai pemangku kepentingan di desa tujuan wisata.

Model partisipasi substantif yang disebut informan dimana oleh France sebagai self-mobilization yang merupakan tahapan berkualitas tertinggi dalam partisipasi masyarakat untuk mengembangkan Desa Wisata. Tahapan tersebut mengandalkan partisipasi masyarakat lokal untuk mengembangkan Desa Wisata. Kesadaran mereka telah terbentuk terutama dari kekuatan modalnya dari aktifitas parawisata.

Proses membentuk partisipasi publik adalah tahapan untuk mewujudkan kesadaran warga bahwa mereka adalah penduduk di destinasi wisata (tourism behavior). Kesadaran tersebut inspirasi dalam kecenderungan mendukung kebijakan pengembangan Desa Wisata seperti bersikap ramah terhadap wisatawan, tidak melakukan hal yang kontraproduktif dengan pengembangan wisata dan mampu memanfaatkan potensi wisata untuk kegiatan ekonomi kreatif.

Implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat juga dipengaruhi oleh struktur birokrasi dimana dalam kerangka pemikiran Edward III (1980), dua aspek terpenting dalam struktur birokrasi ketika mengimplementasikan kebijakan adalah prosedur operasional kerja atau SOP. Dalam penelitian ini belum ada SOP yang baku untuk pelaksanaan kebijakan. Peraturan Daerah hanya menjadi panduan umum tentang garis besar kebijakan. Padahal SOP berguna untuk menyeragamkan tindakan para pelaksana sehingga menjadi efektif. Kebijakan pengembangan Desa Wisata menjadikan dinas pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai leading sector implementasinya. Dalam konteks ini, Bupati Bolaang Mongondow Timur telah mendelegasikan kewenangan kepada organisasi pelaksana tersebut melalui Peraturan Bupati. Dari kewenangan yang ada dalam peraturan bupati diketahui bahwa wewenang dan segala hal yang melekat (fungsi, kewajiban) sudah sesuai dengan tugas yang diberikan. Untuk mengimplementasikan kebijakan

Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diperlukan fasilitas. Fasilitas tersebut mulai dari dukungan pendanaan maupun fasilitas fisik yang dibutuhkan. Dukungan pendanaan didapatkan dari APBD dan APBN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap fasilitas dalam mengembangkan Desa Wisata ini belum maksimal. Pemerintah daerah masih terkendala dengan pembiayaan akibat adanya kebijakan refofusing anggaran oleh karena pandemi covid-19. Padahal aspek ini sangat penting dalam menunjang penerapan kebijakan desa wisata.

Dukungan fasilitas fisik sebagai sarana penunjang desa wisata sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan teori kepariwisataan di mana pengembangan Desa Wisata perlu memperhatikan sejumlah aspek seperti atraksi, akomodasi, aksesibilitas, infrastruktur pendukung, kelembagaan dan sumberdaya manusia.

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan
Pada tahap ini sudah dilakukan dengan baik bahkan kedua desa yaitu Desa Atoga Timur dan Desa Bukaka memiliki masterplan yang secara manual mereka gambarkan untuk Desa Atoga Timur dan sudah tiga dimensi untuk Desa Bukaka.
2. Tahap Formulasi Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan pengembangan Desa Wisata sudah dilaksanakan dengan baik namun belum melibatkan unsur terkait, SKPD yang terlibat belum pernah duduk bersama untuk membicarakan pengembangan Desa Wisata, nanti ada penelitian ini baru semua SKPD yang terkait terlibat.
3. Tahap Adopsi dan Legitimasi Kebijakan
Kebijakan terkait Surat Keputusan Bupati tentang penetapan Desa Wisata belum sepenuhnya dipahami sampai di desa yang ditetapkan menjadi Desa Wisata sehingga Peraturan Desa yang dibuat belum sepenuhnya bersinergi dengan pengembangan Desa Wisata, namun tahun depan dipastikan melalui penelitian ini sudah terintegrasi dengan koordinasi yang baik.
4. Tahap Implementasi
Adanya tujuan dan sasaran yang jelas, namun dilapangan belum diikuti dengan fasilitas dalam pengembangan desa belum maksimal, pemerintahan desa terkendala pembiayaan untuk kembali pulih seperti sebelum Pandemi Covid 19. Karena desa perlu menyediakan

atraksi, akomodasi, aksesibilitas dan infrastruktur pendukung, kelembagaan dan sumberdaya manusia.

5. Tahap Evaluasi

Untuk kebijakan pengembangan Desa Wisata belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat untuk efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dalam membuat kebijakan. Namun demikian, penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pengembangan Desa Wisata harus benar ditetapkan berdasarkan standar dan kriteria. Sehingga tidak ada kesalahan persepsi yang selama ini terjadi tentang kriteria dan bagaimana pengembangan Desa Wisata..

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur disarankan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peranan masing-masing aktor dalam setiap formulasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang akan datang sehingga kebijakan pariwisata yang dirumuskan dimasa mendatang akan dapat diimplementasikan dengan lebih tepat, dan selanjutnya bisa mengusulkan Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dalam memformulasikan kebijakan pariwisata hendaknya juga memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan mengenai kesiapan Sumber Daya Manusia, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata dalam mengelola objek wisata di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bersama Dinas, harus terus memacu semangat dan motivasi masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata untuk mengembangkan, mempromosikan, dan memelihara objek wisata

DAFTAR PUSTAKA

- Christian, Eka. 2019. Implementasi Kebijakan Pariwisata Berdasarkan Kearifan Lokal (Studi Kasus Kabupaten Kotawaringin Barat). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Volumen 7 Nomor 1. Hal 8-14
- Dinas Pariwisata Kab. Boltim. 2020.
- Edwards III, George. C. *Implementing Public Policy*. CQ Press, Politics and Public Policy Series
- Hermawan, D., dan S. S. Hutagalung. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Industri Pariwisata (studi terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata di Lampung Selatan). *ISBN No. 9 786239 1972209*

- Mapahena, Max Iver. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung*. Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN (p) 2685-4298. Universitas Sam Ratulangi
- Pambudi, A.S., M.F. Masteriarsa, A.D.C Wibowo. I. Amaliyah, dan A.K.Ardhana. 2020. Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19. *Majalan Media Perencana. Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia*. Vol.1. No,1 (9)
- Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Objek Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Rohmah, Ainur. 2020. Pandemi Covid 19 dan Dampaknya Terhadap Perilaku Konsumen di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.1 No. 7 (12): 1373-1378. ISSN 2722-9475
- Sudibya, Bagus. 2018. Wisata dan Desa Wisata. *Jurnal Bappeda Litabng*. Vol.1, No 1, April. Hal 21-25
- Sugiarto, A. dan I. G. A. O. Mahagangga. 2020. Kendala Pengembangan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. (Studi Kasus Komponen Produk Pariwisata) *Jurnal Destinasi Pariwisata Vol. 8, No. 2, e-ISSN: 2548-8937*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Zendrato, Samudra Kurniawan. 2014. *Kebudayaan dan Pariwisata Nias*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media